

Jakarta, 26 Januari 2021

Nomor : S. 027 /DIR/CSGC/I/2021
Lampiran : 3 (tiga) berkas

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.204
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini kami sampaikan Laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") sehubungan dengan telah diterimanya remunerasi yang bersifat variable oleh anggota Direksi yang menjabat di Perseroan diantara periode 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020, atas kinerja Perseroan tahun buku 2018, sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bahwa penerimaan remunerasi yang bersifat variable dimaksud diatas telah dilakukan melalui pengalihan saham Treasuri Perseroan dengan tanggal transaksi 25 Januari 2021.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan atas nama Direksi yang masih menjabat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Gatot Adhi Prasetyo	Direktur
2.	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan

Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK



Hadi Wibowo
Direktur Utama


Fachmy Achmad
Direktur

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk
6. PT Datindo Entrycom

**LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN
SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA**

No. : - Jakarta, 26 Januari 2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4
Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gatot Adhi Prasetyo
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Pisok III EA 13/3 BTR 5 RT/RW 003/011 Jurangmangu
Timur Pondok Aren Tangerang Selatan
Nomor Telepon : 021 30026400
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang tentang Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka, melaporkan bahwa telah memiliki saham PT Bank BTPN Syariah Tbk dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nama Saham Perusahaan Terbuka	:	PT BTPN Syariah Tbk (Perseroan)
2	Jumlah Saham dan presentase kepemilikan saham sebelum transaksi dan setelah transaksi	:	Sebelum Transaksi : 0 lembar saham Setelah Transaksi : 54.100 lembar saham Yang bertandatangan sebelum pelaksanaan transaksi belum memiliki saham Perseroan
3	Harga Perolehan Per Saham	:	Rp. 2.040,00 (Dua Ribu Empat Puluh Rupiah) per saham. (Harga Saham per 15 Februari 2019)
4	Tanggal Transaksi	:	25 Januari 2021
5	Tujuan dari transaksi	:	Dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi atas kinerja Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6	Status Kepemilikan Saham	:	Kepemilikan Langsung

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Yang bertandatangan,

Nama : Gatot Adhi Prasetyo

Tembusan:
Divisi Human Capital - PT Bank BTPN Syariah Tbk

**LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN
SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA**

No. : - Jakarta, 26 Januari 2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4
Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arief Ismail
Jabatan : Direktur Kepatuhan
Alamat : Cikini Bintaro FG 5-12 RT/RW 002/007 Jurangmangu Barat
Pondok Aren Tangerang Selatan
Nomor Telepon : 021 30026400
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang tentang Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka, melaporkan bahwa telah memiliki saham PT Bank BTPN Syariah Tbk, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nama Saham Perusahaan Terbuka	: PT BTPN Syariah Tbk (Perseroan)
2.	Jumlah Saham dan presentase kepemilikan saham sebelum transaksi dan setelah transaksi	: Sebelum Transaksi : 0 lembar saham Setelah Transaksi : 42.900 lembar saham Yang bertandatangan sebelum pelaksanaan transaksi belum memiliki saham Perseroan
3.	Harga Perolehan Per Saham	Rp. 2.040,00 (Dua Ribu Empat Puluh Rupiah) per saham. (Harga Saham per 15 Februari 2019)
4.	Tanggal Transaksi	25 Januari 2021
5.	Tujuan dari transaksi	Dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi atas kinerja Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6.	Status Kepemilikan Saham	: Kepemilikan Langsung

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Yang bertandatangan,



Nama : Arief Ismail

Tembusan:
Divisi Human Capital - PT Bank BTPN Syariah Tbk

PROPERTI TERDAMPAK COVID-19

RUMAH TAPAK TEMPAT BERPIJAK

Teka-teki seberapa cepat pemulihan sektor properti dari dampak buruk pandemi virus corona sepanjang tahun lalu mulai terkuak dengan naiknya jumlah peminat rumah tapak di Indonesia.

Yanita Petriella & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Pada kuartal IV/2020, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) melaporkan peminat rumah tapak atau landed house mulai terlihat setelah kuartal sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan sektor properti khususnya perumahan akan mengalami pemulihan paling cepat dibandingkan dengan subsektor lainnya.

“Yang paling cepat tumbuh di 2021 adalah penjualan sektor perumahan. Diperkirakan kuartal I saja sudah mulai ada peningkatan,” ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (7/1).

Untuk properti jenis lain seperti apartemen, perkantoran, hotel dan mal, dia memprediksi mengalami pemulihan cukup lama. Perbedaan tersebut disebabkan banyak investor yang lebih memilih menyimpan uangnya daripada membeli properti karena adanya ketidakpastian ekonomi.

Oleh karena itu, dia menilai para pengelola kantor dan mal harus memiliki terobosan agar bisa bertahan. Dia menyarankan pengelola properti komersial mengubah konsep yang akan ditawarkan pada era *new normal*.

Menurutnya, bisnis penyewaan kantor dan mal baru pulih pada 2022. “Sehingga mereka harus berpikir kreatif untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang,” tutur Paulus.

Prediksi pemulihan properti yang dimulai dari perumahan juga disampaikan Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto.

Pada tahun ini, dia menyatakan sektor properti rumah tapak memiliki prospek yang bagus apalagi rumah menjadi salah satu kebutuhan primer. “Rumah tapak ini kebanyakan *end user* untuk tempat tinggal sehingga prospeknya bagus beda apartemen yang dijadikan investasi sebagian besar,” kata Ferry.

Selain itu, prospek pulihnya properti rumah tapak didorong kemudahan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Adapun, rumah tapak yang paling diminati atau diserap pasar memiliki harga berkisar

antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar.

“Untuk di bawah Rp500 juta ini menengah ke bawah yang juga menunggu kepastian, atau mengalami PHK, pemotongan gaji. Kalau yang Rp2 miliar ke atas juga menunggu kondisi pulih,” ucapnya.

Pandangan sedikit berbeda datang dari CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Trangganda. Menurutnya, sektor properti akan mengalami pemulihan mulai semester II/2021 karena sampai dengan semester I/2021 masih belum stabil.

Dia menilai kondisi sektor properti sepanjang tahun ini memang masih belum bisa dipastikan karena banyak variabel yang sangat dinamis.

“Tapi harusnya bisa lebih baik dibandingkan 2020. Karena tahun 2020 aja itu secara tahunan masih turun 32% dibandingkan dari tahun 2019,” ujarnya.

Dia menambahkan sektor properti yang paling cepat mengalami *recovery* yakni untuk perumahan terutama untuk harga Rp500 juta dan Rp1 miliar. Nantinya, segmen rumah jenis itu menjadi penggerak untuk pemulihan.

SEJUTA RUMAH

Sayangnya, pembangunan rumah di Indonesia sering kali tak mencapai target, meskipun dianggap sebagai pendorong pemulihan dari pandemi.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan rumah di Indonesia yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah hingga 21 Desember 2020 baru mencapai 902.886 unit rumah. “Dari data yang kami miliki per tanggal 21 Desember 2020 lalu angka capaian Program Sejuta Rumah telah menembus angka 902.886 unit rumah,” ungkapnya.

Khalawi menjelaskan pembangunan perumahan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Menurutnya, Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015 dan juga menjadi Program Strategis Nasional (PSN) perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pengembangan, perbankan, sektor industri dan masyarakat.

“Yang paling cepat tumbuh di 2021 adalah penjualan sektor perumahan.”



Sektor perumahan, katanya, harus tetap berjalan karena dapat membantu pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19.

Selain itu, pembangunan perumahan yang baik dari sisi kualitas dan layak huni juga dapat membuka lapangan kerja, mendorong kinerja sektor industri sekaligus menjaga kesehatan masyarakat agar bisa terhindar dari terpapar Covid-19.

Dia menjamin pemerintah tetap berupaya mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat di seluruh Indonesia, meskipun hasil pencapaian pembangunan perumahan mungkin belum mencapai target maksimal yakni 1 juta unit per tahun.

Data Ditjen Perumahan per 21 Desember 2020, jumlah pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah telah mencapai 902.886 unit terdiri atas rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 677.616 unit dan rumah non-MBR sebanyak 225.270 unit.

“Pembangunan rumah untuk MBR yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR tercatat 200.881 unit, Kementerian Lain 51.136, pemerintah daerah 33.925 unit,” ujarnya.

Selain itu, pengembangan perumahan telah membangun rumah 383.033 unit. Pembangunan rumah juga banyak dilaksanakan oleh sektor swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR) sebanyak 3.681 unit dan masyarakat membangun rumah secara mandiri 4.960 unit.

Untuk rumah MBR yang dibangun oleh pengembang sebanyak 178.749 unit dan masyarakat sebanyak 46.521 unit. ■

KEBUTUHAN POKOK

Sektor properti khususnya perumahan bakal pulih paling cepat dibandingkan dengan sektor lain setelah terdampak pandemi Covid-19. Perumahan yang merupakan kebutuhan pokok manusia menjadi alasan utama sektor itu pulih lebih dulu.

Rencana Strategis Pembangunan Rumah Kementerian PUPR 2020-2024 (unit)

Kategori	Jumlah
SMF	50.000
Subsidi BP2BT	100.000
BP Tapera	500.000
Subsidi perumahan FLPP/SSB - SBUM	900.000
Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat	3.450.000

Sumber: RPJMN Kementerian PUPR
SMF: Sarana Multifungsi Finansial, MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah, BP2BT: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, FLPP: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan



Pencapaian Program Sejuta Rumah Periode 2020

Target	: 1 juta unit
Realisasi	: 902.886 unit*
*)Hingga 21 Desember	

Backlog Perumahan di Indonesia Per 2020 (juta unit)

Rumah untuk MBR non fixed income	6,48
Rumah untuk MBR fixed income	1,72
Rumah untuk non-MBR	0,56
Rumah Tidak Layak Huni	2,36

Sumber: Kementerian PUPR, diolah

PELABUHAN BARU

Pelindo III Jadi Operator Sementara Patimban

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perhubungan menunjuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai operator sementara Pelabuhan Patimban, sampai dengan konsorsium pemenang lelang yang dipimpin CT Corp siap mengelola pelabuhan baru tersebut.

Penunjukkan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 351/2020 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Melaksanakan Pengoperasian Sementara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tertanggal 29 Desember 2020.

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III telah menunjuk General Manager Pelabuhan Patimban Sandy Syahrial Alam yang sebelumnya menjabat Commercial and Business Development Manager PT Terminal Petikemas Surabaya (TPKS), anak usaha BUMN itu.

Dalam Konsorsium Patimban, TPKS merupakan salah satu anggota bersama PT CT Corp Infrastruktur Indonesia, PT Indika Logistic & Support Services, dan PT U Connectivity Services.

Sandy menyatakan tantangan utama mengelola Pelabuhan patimban adalah pembentukan sistem dan *standard operational procedure* (SOP). “Saya hadapi industri eksklusif sehingga orang-orang bertemu itu lagi itu lagi. Walaupun kita pindah ke Patimban komunitasnya juga itu lagi-itu lagi,” katanya dalam acara *Public Expose* Pelabuhan Patimban, Kamis (7/1).

Dalam kesempatan yang sama, Menhub Budi Karya Sumadi menargetkan waktu inap barang atau *dwelling time* di Pelabuhan Patimban hanya kurang dari 2 hari dengan akses yang lebih cepat dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional.

“Patimban dikelola swasta dengan skema KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha] atau PPP [public private partnership] diharapkan dapat memberi layanan prima, mengelola *dwelling time* bisa kurang dari 2 hari, bersamaan dengan pengurangan biaya *tracking* [karena jarak lebih dekat ke industri] dan *dwelling time*, ini akan berkontribusi mengurangi biaya logistik nasional secara signifikan,” kata Budi.

Dengan standar *dwelling time* dan akses yang lebih cepat, pengiriman

kendaraan dari Karawang lebih efisien menuju Pelabuhan Patimban, baik untuk kebutuhan ekspor maupun pengiriman antarpulau.

“Dengan adanya perbaikan itu, disusul terminal peti kemas mendatang, Desember 2021 dapat memulai dan berbagi dengan Tanjung Priok untuk efisiensi biaya dan waktu,” katanya.

Pelabuhan Patimban, kata dia, membuktikan walaupun pandemi Covid-19 melanda, pembangunan di Indonesia tidak terpengaruh.

TAGIH JANJI

Sementara itu, Pemerintah Jepang menagih janji Presiden Joko Widodo membentuk operator bersama Pelabuhan Patimban setelah terpilihnya konsorsium yang dipimpin CT Corp sebagai operator pelabuhan itu.

Minister of Economic Affairs of the Embassy of Japan Tadayuki Miyashita menuturkan Pelabuhan Patimban telah menjadi proyek simbolis hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan itu akan memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, termasuk upaya mempromosikan ekspor, menciptakan iklim investasi yang baik, hingga pengalihan teknologi dan pengembangan SDM. Dia juga menegaskan infrastruktur (*hard infrastructure*) saja tidak cukup untuk meningkatkan daya saing hingga mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang.

“Kami tengah menanti agar konsorsium Jepang dan konsorsium Indonesia ini dapat membentuk kerja sama sebagai Indonesia-Jepang *joint operator* dalam waktu dekat, sebagaimana yang sudah disepakati Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Jepang,” katanya.

Dia menegaskan konsorsium Indonesia-Jepang dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelabuhan.

Tadayuki menekankan upaya tersebut hanya dapat terlaksana melalui manajemen operasi pelabuhan itu penting untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dia juga menegaskan pentingnya menggaet pelanggan. “Ini penting untuk mendapatkan penilaian yang tinggi dan reputasi yang baik dari pelanggan. Tanpa mereka pelabuhan hanya menjadi harta karun yang tak berguna.” (Rinaldi M. Azka)



KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI PT BANK BTPN SYARIAH TBK

PENDAHULUAN

PT Bank BTPN Syariah Tbk (“Perseroan”) telah melaksanakan pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 30/2017”), berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019.

Jumlah saham yang telah dibeli kembali tersebut (saham treasury) adalah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2020 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham, dengan biaya perolehan seluruhnya sebesar Rp. 9.763 Juta, dengan demikian harga rata-rata sebesar Rp. 3.905,2 per saham.

Tujuan Pembelian Kembali Saham sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar Harian Kompas dan Kontan, situs web Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 25 Juli 2019 adalah dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi atas kinerja Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK No.59/2017”).

RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI

Perseroan berencana melakukan alokasi dan distribusi sebagian dari saham treasury tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut :

1. Pengalihan Sebagian Saham Treasuri

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dilakukan di luar Bursa Efek dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017 (Pasal 24).

2. Pihak-Pihak Yang Akan Menerima Saham Treasuri

Pihak-pihak yang akan menerima alokasi dan pendistribusian Saham Treasuri (“Pihak Penerima”) yang merupakan bagian dari remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sesuai Peraturan OJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi yang menjabat di Perseroan di antara periode 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020, sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/2021 tanggal 4 Januari 2021. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

3. Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Treasuri

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri yaitu sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, yang dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan harga saham per tanggal 15 Februari 2019 yang telah dikomunikasikan kepada Penerima pada tanggal 14 Februari 2019.

4. Status Saham Treasuri yang dialokasikan kepada Pihak-Pihak Yang Akan Menerima Saham Treasuri yang akan dialokasikan dan didistribusikan tersebut adalah merupakan bagian dari remunerasi dalam bentuk bonus yang ditangguhkan, dengan demikian pada saat saham treasury dibagikan pada tanggal 25 Januari 2021 tersebut, tidak akan dikenakan *Lock-up*, dan dengan demikian dapat ditransaksi dan dipindah tangkankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek.

Demikian Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 30/2017 (Pasal 23) terkait Keterbukaan Informasi.

Jakarta, 8 Januari 2021
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi